

Instrumen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bunga Purnamasari*

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Citation (APA 7th): Purnamasari, B. (2024). Instrumen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-12.



Copyright: © 2024 by the authors.

ABSTRACT: This research aims to explore and analyze national income calculation from an Islamic economic perspective. Using a qualitative descriptive method through literature review, this study focuses on how Islamic economic instruments such as zakat, waqf, and sadaqah can be integrated into national income calculations. Through a normative sharia approach, this research examines various concepts and theories related to national income from both conventional and Islamic economic perspectives. Findings indicate that measuring welfare in Islamic economics requires a more holistic approach, including income distribution, subsistence production, and contributions from social and religious instruments. This study also highlights the importance of integrating moral and social values into welfare analysis.

The implications of these findings suggest the need for adopting a more inclusive model of national income calculation within the Islamic economic context, which can support the development of more effective policies to address poverty and inequality. This research contributes significantly to the understanding of Islamic economics and its application in economic

Keywords: National Income; Zakat, Infaq; Sadaqah; Islamic Economics

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penghitungan pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat diintegrasikan dalam penghitungan pendapatan nasional. Melalui pendekatan normatif syariah, penelitian ini mengkaji berbagai konsep dan teori terkait pendapatan nasional, baik dari perspektif ekonomi konvensional maupun Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang lebih holistik, mencakup distribusi pendapatan, produksi subsisten, serta kontribusi dari instrumen sosial dan keagamaan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam analisis kesejahteraan, sehingga perlunya adopsi model penghitungan pendapatan nasional yang lebih inklusif dalam konteks ekonomi Islam, yang dapat mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman ekonomi Islam dan aplikasinya dalam pengelolaan ekonomi, dengan harapan penelitian lanjutan dapat mengatasi batasan-batasan yang ada dan memperluas aplikasi model ini di berbagai konteks ekonomi.

Kata Kunci: Pendapatan Nasional; Zakat; Infaq; Sedekah; Ekonomi Islam

*Corresponding Author : bungapurnamasari2@gmail.com

DOI: 10.35905/taswiq.v1i1.10697

ISSN-E:

ISSN-P:

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>

Publisher: Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare

PENDAHULUAN

Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian negara salah satunya pada substansi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara (Muhammad, 2020). Pendapatan nasional dapat dihitung setelah diketahui nilai dari unsur ekonomi negara lainnya, antara lain *Gross Domestic Product* atau GDP. Dalam perhitungan pendapatan nasional ada beberapa pendekatan yaitu pendekatan produk neto, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dari tingkat pendapatan nasional, kemudian dibagi jumlah penduduk, maka akan ditemukan pendapatan perkapita (*income per capita*) negara tersebut.

Negara merupakan otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas keuangan yang secara tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi persoalan fundamental yang kompleks (Gultom, 2019).

Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, maka penting untuk mengintegrasikan pemahaman ekonomi Islam dalam analisis dan pengelolaan pendapatan nasional sebagai alternatif pendukung pengelolaan ekonomi nasional. Islam sebagai agama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan komprehensif (kaffah). Universal memiliki arti bahwa ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh manusia atau masyarakat baik nilai keadilan, musyawarah, dan amanah. Sedangkan komprehensif berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun aspek-aspek lain.

Pada dasarnya, Islam mempunyai tiga unsur utama, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Adapun syariah memiliki dua aspek dasar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penghambaan diri kepada Allah, sedangkan muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan interaksi antara sesama manusia termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk salah satunya aktivitas ekonomi. Begitu banyak firman Allah yang mengatur manusia tentang bagaimana cara melaksanakan aktivitas ekonomi dengan baik, yang pada intinya adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah subhanahu wa ta'ala.

TINJAUAN TEORITIS

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh *Sir William Petty* dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya

(Inggris) pada tahun 1665. Secara sederhana pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara pada periode tertentu biasanya satu tahun (Huda et al., 2018). Pendapatan nasional menurut Mukti Hakim adalah jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh orang-orang di suatu negara selama satu tahun (Hakim, 2015). Dalam ilmu ekonomi konvensional, pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan jumlah GNP (*Gross National Product*) (Nasution, 2007). Dari pembelajaran teori ekonomi makro kita pahami untuk mengukur besarnya GNP berdasarkan dari 3 yakni pengeluaran untuk membeli barang dan jasa, nilai barang dan jasa akhir, dan faktor produksi dengan menjumlahkan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi (upah, bunga, sewa, keuntungan). Dalam perhitungannya, menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan para ahli ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional.

Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product (GNP)*), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara (Muhammad, 2020). Pengertian lain dari pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Adinugraha, 2021). Dalam sistem perhitungan pendapatan nasional, jumlah pendapatan itu dinamakan Produk Nasional Neto pada harga faktor atau secara ringkas (Sukirno, 2015).

Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi/rumah tangga (RT), yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam sebuah negara pada suatu periode tertentu (biasanya dalam kurun waktu 1 tahun). Secara sederhana pendapatan nasional (*national income*), merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun.

Untuk menghitung produk nasional, seluruh perekonomian negara dipecah pecah ke dalam 11 sektor atau lapangan usaha (*industrial origin*). Pemecahan ke dalam 11 sektor ini dianggap sudah tuntas, tak ada yang tersisa. Pengertian sektor di sini berbeda dengan pengertian dalam metode pengeluaran atau mungkin pula dalam Repelita. Masing-masing sektor dibagi-bagi lagi ke dalam subsektor-subsektor. Kegiatan dalam satu sektor atau lebih dipegang oleh satu departemen atau lebih. Tapi tidak semua kegiatan dipegang oleh departemen, misalnya kegiatan swasta, baik berupa perdagangan, perindustrian maupun pertanian. Produk Nasional adalah volume produksi barang akhir kali harga (nilai), atau nilai tambah barang-barang dan jasa-jasa kali harga (nilai) (Partadiredja, 1994).

Contoh yang paling jelas adalah pertanian subsistens. Apa yang dikonsumsi tidak didapat dengan jalan dibeli dari pasar tapi berasal dari hasil produksi sendiri. Karena itu Perhitungan Pengeluaran Nasional lebih sukar daripada Produk Nasional. Bahkan beberapa pengeluaran tidak mungkin dapat dihitung tanpa ada Produk Nasional. Mengingat kesulitan-kesulitan yang demikian banyak itu, maka usaha BPS untuk menghitung Produk Nasional dan Pengeluaran Nasional patut dihargai (Partadiredja, 1994). Adapun jenis-jenis pendapatan nasional sebagai berikut:

1. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestik Product*).

Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu Negara (domestik) selama satu periode. Dalam menghitung GDP jumlah pasar, yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada penghitungan ganda atau double accounting. Konsep GDP meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara pada suatu negara, baik di luar negeri maupun dalam negeri (Sukirno, 2015).

2. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*).

Produk nasional bruto atau PNB adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara (nasional) selama satu periode. Dalam menghitung besarnya GNP berdasarkan harga pasar, yang harus diperhatikan yaitu jangan sampai ada perhitungan ganda. Dalam GNP ini, hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada didalam negeri maupun diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut (Sukirno, 2015).

3. Produk Nasional Netto (*Net National Product*)

Produk Nasional Netto (NNP) adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian (Damanik et al., 2022). Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran, sehingga dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. Penyusutan adalah berkang barang yang sudah lama karena pemakaian (Yoshanda, 2020).

4. Pendapatan Nasional Netto (*Net National Income*).

Pendapatan Nasional Netto (NNI) adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI bisa didapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan subsidi. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang beratnya dapat digesekan kepada pihak lain, contoh pajak penjualan, pajak impor, bea ekspor, dan cukai-cukai. Sedangkan subsidi adalah bantuan dari pemerintah kepada masyarakat (Yoshanda, 2020).

5. Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*)

Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Pendapatan perseorangan dapat diperhitungkan dari NNI dikurangi dengan : Pajak Perseroan, Laba yang tidak dibagi, Iuran pensiun dan Asuransi (Yoshanda, 2020). Pendapatan perseorangan ini juga mengurangi kontribusi pada tunjangan sosial (Mankiw, 2006). Dalam pendapatan perseorangan termasuk juga pembayaran transfer (transfer payment).

6. Pendapatan yang siap dibelanjakan (*Disposable Income*).

Pendapatan Disposable merupakan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. *Disposable income* adalah nilai yang tersisa dari pendapatan pribadi (*personal income*) yang dikurangi dengan pajak langsung yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan (Sukirno, 2015).

Untuk penghitungan pendapatan nasional itu sendiri menggunakan 3 cara pendekatan yaitu:(Yuliadi, 2019)

1. Pendekatan Pengeluaran

Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai perbelanjaan dari berbagai golongan masyarakat ke atas barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan dalam perekonomian tersebut. Barang-barang atau jasa-jasa yang diimpor tidak dimasukkan dalam penghitungan ini. Penghitungan dengan metode pendekatan ini paling lazim digunakan dan disajikan oleh negara-negara dunia (Damanik et al., 2022).

Perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran Konsumsi

I = Pengeluaran Investasi

G = Pengeluaran Pemerintah

X = Eksport

M = Import

2. Pendekatan Produk Neto

Pendekatan produk neto disebut juga pendekatan nilai tambah yang telah diperoleh dalam suatu proses produksi yang telah dilakukan (Curatman, 2010). Pendekatan ini menghitung dengan cara nilai tambah dari setiap proses produksi yang dilakukan itu di jumlah dan dalam kurung waktu satu periode dan biasanya dalam waktu satu tahun.

$$PDB/Y = \{ (Q1 + Q2) + (Q2 \cdot P2) + \dots + (Qn + Pn) \}$$

3. Pendekatan Pendapatan

penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga. Atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama satu tahun. Pendapatan ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba usaha. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan Pendapatan dapat menggunakan rumus berikut (Sukirno, 2015):

$$Y = R + W + I + P$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

R = Rent (Sewa)

P = Profit (laba)

W = Wages (upah)

I = Interest (bunga)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research atau kajian pustaka. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis instrumen pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada sumber-sumber literatur yang relevan. Pendekatan normatif syariah diterapkan untuk mengkaji dan menginterpretasi data berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari literatur dan referensi yang ada. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana instrumen-instrumen ekonomi Islam diterapkan dalam konteks pendapatan nasional. Penelitian ini mengacu pada kajian-kajian terdahulu, seperti yang dijelaskan oleh Kris (2018), untuk memberikan dasar teori dan analisis yang solid.

HASIL

Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) merupakan sebuah system yang dapat mengantar umat manusia kepada *real*

welfare (falah), kesejahteraan yang sebenarnya. Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Pada intinya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam (Nasution, 2007). Setidaknya ada empat hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. Empat hal tersebut adalah (Huda et al., 2018):

1. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga

Penghitungan pendapatan nasional islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-nilai sosial dan ekonomi Islami bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsistens, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola secara subsistens ke dalam penghitungan GNP. Paling tidak, dugaan kasar dari hasil produksi subsistens tersebut harus masuk ke dalam penghitungan pendapatan nasional. Komoditas subsistens ini, khususnya pangan, sangatlah penting di negara-negara Muslim yang baru dalam beberapa dekade ini masuk dalam percaturan perekonomian dunia.

3. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan Ekonomi Islami

Kita sudah melihat bahwa angka rata-rata perkapita tidak menyediakan kepada kita informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif atau kebutuhan dasar akan barang dan jasa, sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi dan pelayanan publik lainnya, sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu negara atau bangsa.

Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordhaus dan Tobin dengan *Measures for Economics Welfare* (MEW), dalam konteks ekonomi Barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan

manusia. Perkiraan MEW di dasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya sangat bergantung pada tingkat konsumsinya.

4. Penghitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Pendugaan Nilai Santunan Antar saudara dan Sedekah

Kita tahu bahwa GNP adalah ukuran moneter dan tidak memasukkan transfers payments seperti sedekah. Namun haruslah disadari, sedekah memiliki peran yang signifikan di dalam masyarakat Islam. Dan ini bukan sekadar pemberian secara sukarela pada orang lain namun merupakan bagian dari kepatuhan dalam menjalankan kehidupan beragama. Di dalam masyarakat Islam, terdapat satu kewajiban menyantuni kerabat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meski tidak gampang memperoleh datanya, upaya mengukur nilai dari pergerakan dana semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat Islam.

Di sejumlah negara muslim, jumlah dan kisaran dari kegiatan dan transaksi yang didasarkan pada keinginan untuk melakukan amal kebaikan, memiliki peran lebih penting dibanding di negara Barat. Tidak hanya karena luasnya kisaran dari kegiatan ekonomi yang diambil alih oleh keluarga maupun suku, tetapi juga ada begitu banyak ragam kewajiban santunan di antara anggota keluarga. Tidak semuanya melibatkan jumlah uang yang besar, karena yang terjadi kadang-kadang hanya merupakan hibah berupa barang atau jasa yang kecil nilainya. Ada satu kesenjangan keterkaitan antara jasa dan pembayaran, misalnya donasi untuk pemeliharaan masjid, menggaji imam masjid, kegiatan pedesaan, dan lain-lain. Adalah penting untuk menentukan sifat alami dan tingkatan dari amal shadaqah antar saudara (Huda et al., 2018).

Melalui peningkatan pencatatan dan sektor tambahan dan jenis tambahan dari aktivitas ini dapat dikaji untuk pengambilan keputusan. Dibanding amal sedekah yang sering dikeluarkan umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung, sesungguhnya lebih mudah mengestimasi zakat, satu kewajiban pembayaran transfer yang paling penting di negara muslim. Kini sedang diupayakan mengukur pendapatan dari zakat sebagai persentase dari GNP. Pengukuran ini akan sangat bermanfaat sebagai variabel kebijakan di dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari rancangan untuk mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan peran zakat untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara-negara muslim kini tengah menjadi agenda negara-negara tersebut.

Instrumen Pendapatan Nasional dalam Islam

Pada umumnya, kita ketahui bahwa praktik ekonomi telah lama diakukan oleh individu manusia terlebih lagi Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam merupakan nabi yang membawa ajaran untuk selalu berdagang sehingga

praktik ekonomi telah ada sejak masa Rasullah shallallahu'alaihi wa sallam Negara yang pertama kali dibangun dan berbasis islam adalah negara yang dibangun dan didirirkan sendiri oleh Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam. Yang tepatnya negara tersebut ad di Madinah. Adapun beberapa hal yang menjadi alat yang digunakan nabi dalam memperoleh pendapatan di dalam negaranya yaitu diantaranya sebagai berikut.

a. Zakat

Zakat menurut istilah (syara') artinya sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula (Asnaini, 2008). Zakat merupakan hal yang paling utama digunakan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu negera. Sehingga banyak di antara manusia yang selalu menyamakan zakat dengan pajak, yang dimana pajak juga merupakan hal yang wajib untuk di keluarkan yang juga merupakan salah satu bentuk pendapatan negara. Akan tetapi, pajak dan juga zakat sebenarnya merupakan dua hal bentuk pendapatan negara yang memiliki perbedaan atau memeliki karakter tersendiri (Fajaruddin, 2019). Karena zakat merupakan sebuah ibadah yang didalam terkandung dimensi horizontal dan juga vertikal yang dimana dalam hal ini hubungan antara mansuia dengan Tuhannya dan juga hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan pada sisi pajak hanya berada di titik hubungan manusia dengan manusia. Zakat dan pajak memang pada dasarnya keduanya memiliki sebuah potensi yang sangat besar dalam hal menuntaskan kemiskinan, pengurangan penggaguran, dan meningkatkan pendapatan nasional dalam negara.

Ketika pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, amanah, berasaskan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta terintegrasi maka niscaya dapat menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di Indonesia sehingga Indonesia dapat selangkah lebih maju menuju negara yang sejahtera (Hapsari, 2016).

b. Waqaf

Secara umum yang kita ketahui tentang waqaf adalah waqaf berarti berhenti, menahan atau pun diam. Secara teminologi kita dapat mendefinisikan waqaf sebagai menyerahkan suatu hak milik yang wataknya tahan lama yang dapat digunakan untuk diberikan kepada seseorang atau nazir, baik itu dalam bentuk perorangan atau individu maupun dalam bentuk kelembagaan, yang ketentuannya bahwa hasil yang didapatkan akan dipakai sesuai dengan tututan syariat islam (Hermanto & Rohmi, 2021).

c. Sedekah

Sedekah secara etimologi berasal dari kata Shadaqqa yang memiliki makna tindakan benar. Pada awal pertumbuhan islam sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunnahkan. Sedekah juga merupakan sebuah pemberian

dari syahadat kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yang dapat diwujudkan dengan cara pengorbanan secara materi (Faizin, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, antara lain 1) Permintaan dan penawaran agrerat. Permintaan agrerat merupakan sebuah daftar semua produk baik itu barang atau jasa yang akan dibeli oleh pihak perekonomian pada berbagai tingkatan harga; 2) Konsumsi dan tabungan. Konsumsi merupakan sebuah angka pengeluaran secara keseluruhan dengan tujuan untuk mendapatkan produk dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tabungan merupakan salah satu bagian dari pendapatan yang bukan untuk dikeluarkan untuk keperluan konsumsi; 3) Investasi merupakan seluruh pengeluaran yang dapat kita manfaatkan dengan tujuan untuk membuat modal baru. Karena tujuan dasar dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang telah rusak.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi empat aspek kunci dalam penghitungan pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam, yaitu penyebaran pendapatan individu rumah tangga, produksi di sektor pedesaan, kesejahteraan ekonomi Islami, serta kontribusi sedekah dan zakat. Temuan ini sejalan dengan teori kesejahteraan yang dikembangkan oleh Huda et al. (2018) (Husna, 2014), yang menekankan perlunya pengukuran kesejahteraan yang lebih holistik daripada hanya menggunakan angka rata-rata perkapita. Teori ini menunjukkan bahwa pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam harus mencakup distribusi pendapatan, produksi subsisten, serta kontribusi dari instrumen sosial dan keagamaan, agar bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam.

Adopsi model perlu dilakukan dalam penghitungan pendapatan nasional yang lebih inklusif dalam konteks ekonomi Islam. Pendekatan ini, yang mencakup penyebaran pendapatan, produksi subsisten, dan kontribusi sedekah serta zakat, dapat memperkaya analisis kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Dengan mempertimbangkan dimensi-dimensi ini, pengukuran kesejahteraan menjadi lebih akurat dan relevan, yang pada gilirannya mendukung pembuatan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks teori kesejahteraan, hal ini juga menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan variabel-variabel sosial dan moral dalam pengukuran kesejahteraan, sebagaimana yang dikemukakan oleh teori ekonomi kesejahteraan seperti yang dipaparkan oleh Nordhaus dan Tobin (1972) (Sari, 2022).

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang ekonomi Islam dan aplikasinya terhadap penghitungan pendapatan nasional. Dengan memasukkan dimensi moral dan sosial, serta mempertimbangkan instrumen keagamaan seperti zakat dan sedekah, penelitian

ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai kesejahteraan ekonomi dan sosial.

KESIMPULAN

Dalam perspektif ekonomi Islam, semua metode yang digunakan untuk memperoleh pendapatan adalah sah, asalkan dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Islam, penting untuk membedakan antara cara yang halal dan haram dalam mencari pendapatan, mengikuti teladan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengajarkan untuk berkontribusi dalam ekonomi negara sambil menjaga kemaslahatan dan kebermanfaatan umum. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Negara dapat memanfaatkan berbagai instrumen syariah seperti zakat, pajak, infaq, sedekah, dan wakaf untuk memperoleh pendapatan nasional. Instrumen-instrumen ini tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun penelitian ini menggarisbawahi manfaat dari penerapan prinsip syariah dalam ekonomi, terdapat batasan dalam hal pengukuran dan aplikasi praktis dari instrumen tersebut di berbagai konteks. Kelebihan penelitian ini terletak pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana instrumen-instrumen ini dapat digunakan dalam sistem ekonomi Islam, sementara batasan mencakup tantangan dalam implementasi dan adaptasi di luar konteks negara Muslim.

Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana ekonomi Islam dapat diterapkan dalam penghitungan pendapatan nasional dan pengelolaan ekonomi. Dengan memasukkan berbagai instrumen syariah, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam menilai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi secara Islami. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mengatasi batasan-batasan ini dan memperluas aplikasi model ini dalam berbagai konteks ekonomi.

REFERENSI

- Adinugraha, H. H. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. PT Nasya Expanding Management.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Curatman, A. (2010). *Teori Ekonomi Makro*. Swagati Press.
- Damanik, D., Hermanto, Suatmi, B. D., Guampe, F. A., Sudirman, A., Amalo, F., Syatir, A., Widiyarini, Firdaus, M., Supandi, A., & Supartoyo, Y. H. (2022). *Ekonomi Makro*. CV Media Sains Indonesia.
- Faizin, M. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. PT Nasya Expanding Management.
- Fajaruddin, I. (2019). Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara Dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif). *Jurnal Paradigma Accountancy*, 2(1).

- Gultom, R. Z. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2).
- Hakim, M. (2015). *Pendapatan Nasional*. Badan Pusat Statistik Nasional.
- Hapsari, D. R. I. (2016). Upaya Menekan Angka Kemiskinan serta Pemerataan Pendapatan Nasional Melalui Pembangunan Ekonomi Berbasis Zakat. *Jurnal Legality*, 24(1).
- Hermanto, A., & Rohmi, Y. (2021). *Pengelola Shadaqah, Zakat dan Wakaf*. Literasi Nusantara.
- Huda, N., Nasution, M. E., Idris, H. R., & Wiliasih, R. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group.
- Kris, V. H. (2018). *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (KTI). Deepublish.
- Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Salemba Empat.
- Muhammad. (2020). *Makroekonomi Islam: Suatu Pengantar*. UPP STIM YKPN.
- Nasution, M. E. (2007). *Ekonomi Islam*. Kencana.
- Partadiredja, A. (1994). *Perhitungan Pendapatan Nasional*, Cet 9. PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Press.
- Yoshanda, A. A. (2020). Pendapatan Nasional. *Jurnal Umsida*, 1(1).
- Yuliadi, I. (2019). *Teori Ekonomi Makro Islam*. PT Rajagrafindo Persada.